



KEMENTERIAN KEUANGAN
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

KAJIAN FISKAL REGIONAL



Triwulan I
2018

Penyusun:

Penanggung Jawab: Rina Robiati | Ketua Tim: Irwan Wahyu Basuki | Editor: Lia Amalia | Desain Grafis: Wulandari | Anggota: Saifudin Ali | Yusron |

**KANWIL DITJEN
PERBENDAHARAAN**

Provinsi DKI Jakarta

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
I. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL	1
A. Produk Domestik Regional Bruto.....	1
B. Inflasi.....	3
C. Indikator Kesejahteraan.....	3
II. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN	4
A. Pendapatan Negara.....	5
B. Belanja Negara.....	8
C. Prognosis Realisasi APBN.....	10
III. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD	11
A. Pendapatan Daerah.....	12
B. Belanja Daerah.....	15
C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2017.....	18
IV. PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)	19
A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian.....	19
B. Pendapatan Konsolidasian.....	19
C. Belanja Konsolidasian.....	22
D. Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto.....	24
V. BERITA / ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH	25
A. Peluncuran Sistem Online <i>Si Insan</i> dan <i>Si Padu</i> untuk Penguatan Pengelolaan Keuangan DKI Jakarta.....	25
B. Kebijakan Pemprov DKI Jakarta untuk Hapus Denda Pajak Kendaraan..	25
DAFTAR PUSTAKA	ii

BAB I

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS EKONOMI REGIONAL

A. Produk Domestik Regional Bruto

Pada tahun 2018, proyeksi pertumbuhan ekonomi naik dibandingkan proyeksi 2017. Kebijakan ini berdasar beberapa analisis seperti kondisi perekonomian global yang lebih kuat, masih berlanjutnya berbagai proyek infrastruktur pemerintah, dan semakin kondusifnya perekonomian yang diharapkan dapat memulihkan optimisme sektor swasta dan turut berkontribusi positif mendorong investasi.

Tabel 1.1
Asumsi Makro menurut Kebijakan Umum APBD Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2018

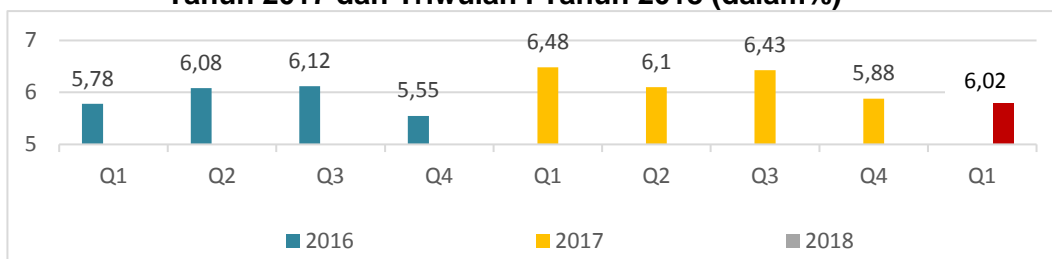
Indikator	Proyeksi DKI 2018	Proyeksi Nasional 2018
Pertumbuhan Ekonomi	6,12 – 6,52 %	5,4 – 6,1 %

Sumber : RKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2018

1. Pertumbuhan Ekonomi Triwulan I Tahun 2018 terhadap Triwulan I Tahun 2017 (y on y).

Perekonomian Jakarta triwulan I 2018 yang diukur berdasarkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp632,61 triliun, sementara menurut harga konstan mencapai Rp420,42 Triliun.

Grafik 1.1
Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Provinsi DKI Jakarta Triwulan I – IV Tahun 2017 dan Triwulan I Tahun 2018 (dalam%)

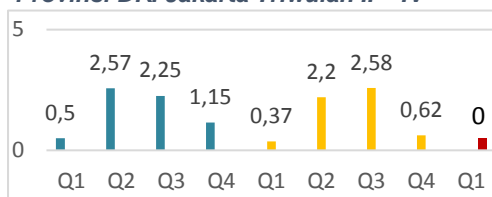


Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta

Pada triwulan I-2018, ekonomi Jakarta tumbuh 6,02 persen bila dibandingkan triwulan I 2017 (y-on-y). Kategori Pengadaan Listrik, Gas merupakan kategori dengan pertumbuhan tertinggi, yakni sebesar 32,94 persen, diikuti Informasi dan Komunikasi sebesar 10,32 persen, dan Transportasi dan Pergudangan sebesar 9,71persen. Semua kategori mampu tumbuh positif, kecuali Jasa Keuangan mengalami kontraksi sebesar minus 1,94 persen.

2. Pertumbuhan ekonomi Triwulan I Tahun 2018 terhadap Triwulan IV Tahun 2017 (q to q).

Ekonomi Jakarta triwulan I 2018 tumbuh sebesar 0,51 persen bila dibandingkan dengan triwulan IV-2017 (q-to-q).

Grafik 1.2 Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) Provinsi DKI Jakarta Triwulan II – IV

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, Berita Resmi Statistik Tahun 2018

Angka ini lebih lambat bila dibandingkan dengan yang dicapai pada triwulan IV-2017 yang sebesar 0,62 persen. Hal ini dikarenakan faktor musiman, dimana pada triwulan I biasanya kondisi perekonomian belum mencapai kapasitas optimal.

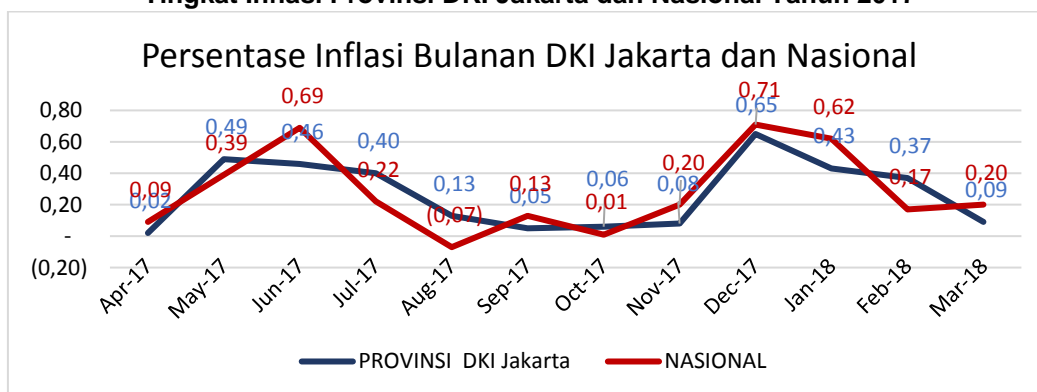
B. Inflasi

Tabel 1.2
Proyeksi Inflasi DKI Jakarta 2018

Indikator	Proyeksi DKI 2018	Proyeksi Nasional 2018
Inflasi	3,50% - 4,00 %	3,5 ± 1%

Sumber : RKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2018

Grafik 1.3
Tingkat Inflasi Provinsi DKI Jakarta dan Nasional Tahun 2017



Sumber: website BPS RI dan website BPS DKI Jakarta tahun 2018

Selama Triwulan I 2018 Laju Inflasi DKI Jakarta bergerak di bawah laju Inflasi Nasional, kecuali pada Bulan Februari dimana Inflasi DKI Jakarta bergerak di atas Laju Inflasi Nasional. Berakhirnya liburan panjang pada bulan Januari menyebabkan tarif angkutan udara dan kereta api mengalami deflasi. Deflasi ini berkontribusi besar dalam menekan laju Inflasi yang besar-besaran terjadi pada kelompok pengeluaran Bahan Makanan. Inflasi pada kelompok Bahan Makanan kembali menjadi penyumbang Inflasi tertinggi pada bulan Februari dan baru mulai menurun pada bulan Maret karena masuknya pasokan bahan pangan ke Jakarta setelah memasuki masa panen di daerah-daerah sentra.

C. Indikator Kesejahteraan

Tabel 1.3
Proyeksi Kemiskinan Menurut Rencana Kerja Pemerintah Daerah 2018

Indikator	Proyeksi DKI 2017
Persentase Penduduk Miskin	3,40 – 3,50

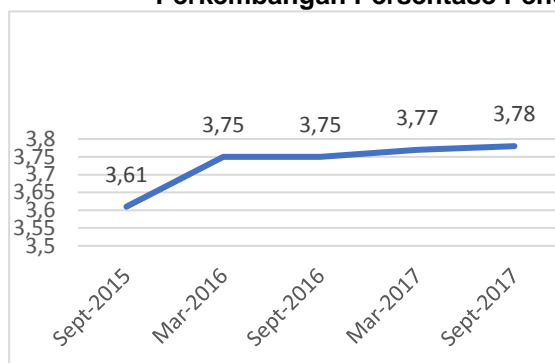
Sumber : RKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2018

Realisasi untuk data Kemiskinan dan Ketenagakerjaan di wilayah DKI Jakarta dapat kami uraikan sebagai berikut :

1. Kemiskinan

Realisasi kemiskinan DKI Jakarta untuk tahun 2017 melebihi dari proyeksi yang ditetapkan.

Grafik 1.4
Perkembangan Persentase Penduduk Miskin di DKI Jakarta



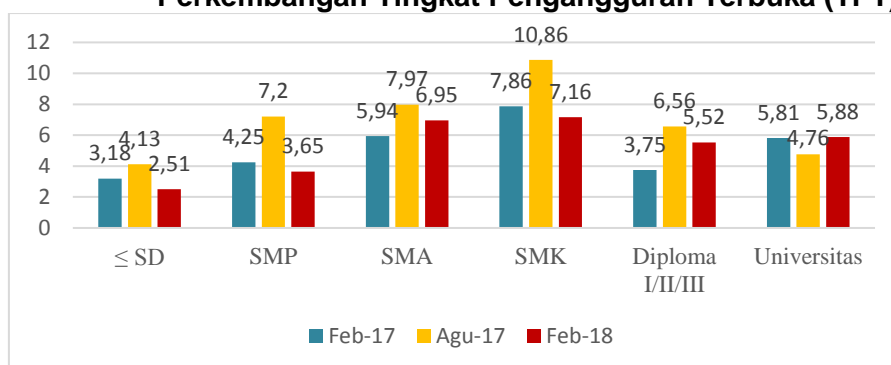
Persentase penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2017 mencapai 3,78 persen yang berarti mencakup sejumlah 393,13 ribu orang. Dibandingkan dengan Maret 2017 (3,77% atau 389,69 ribu orang), persentase penduduk miskin meningkat 0,01 poin atau

meningkat sebesar 3,44 ribu orang.

2. Ketenagakerjaan

Penyerapan tenaga kerja pada Februari 2018 didominasi oleh penduduk yang berpendidikan menengah (SMA sederajat), yaitu sebesar 42,60 persen (2.189 ribu orang). Sedangkan penduduk bekerja berpendidikan rendah (SMP ke bawah) sebesar 36,81 persen (1.892 ribu orang). Penduduk bekerja berpendidikan tinggi (Diploma I ke atas) sebesar 20,59 persen (1.058 ribu orang) terdiri dari 266 ribu orang berpendidikan Diploma dan 807 ribu orang berpendidikan S1 ke atas.

Grafik 1.5
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)



Sumber : Website BPS Provinsi DKI Jakarta

BAB II PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBN

Sebagai pusat pemerintahan Republik Indonesia, Provinsi DKI Jakarta memiliki peran yang sangat penting terhadap pengelolaan APBN secara nasional. Hal ini mengingat sebagian besar dana APBN baik pendapatan maupun belanja negara dikelola oleh Kementerian dan Lembaga yang berlokasi di Jakarta. Postur APBN lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1
Pagu dan Realisasi APBN Lingkup Provinsi DKI Jakarta
s.d. Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	Triwulan I Tahun 2017		Triwulan I Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
A. PENDAPATAN NEGARA	107.532,73	177.765,20	131.432,79	204.621,54
I. PENERIMAAN DALAM NEGERI	95.101,83	177.765,20	130.235,92	204.621,54
1. Penerimaan Pajak	-	149.340,97	-	171.262,91
2. PNPB	95.101,83	28.424,23	130.235,92	33.358,63
II. HIBAH	12.430,90	-	1.196,87	-
B. BELANJA NEGARA	791.352,50	98.290,46	773.636,94	117.554,51
I. BELANJA PEMERINTAH PUSAT	755.801,01	92.069,63	752.235,08	113.550,90
1. Belanja Pegawai	191.336,74	48.315,66	194.489,31	50.970,45
2. Belanja Barang	184.693,87	17.856,51	193.459,88	17.464,99
3. Belanja Modal	131.941,01	3.692,51	108.703,70	1.582,16
4. Belanja Subsidi	178.816,70	12.332,32	173.508,81	25.292,73
5. Belanja Hibah	6.271,80	24,87	0,20	-
6. Belanja Bantuan Sosial	54.099,05	9.483,05	76.774,69	17.847,65
7. Belanja Lain-lain	8.641,84	364,71	5.298,49	392,91
8. Belanja Pembayaran Bunga Utang	-	-	-	-
II. TRANSFER KE DAERAH DAN DANA DESA	18.770,21	6.220,83	21.401,86	4.003,61
1. Transfer ke Daerah	18.770,21	6.220,83	21.401,86	4.003,61
a. Dana Perimbangan	18.770,21	6.220,83	21.401,86	4.003,61
1) Dana Alokasi Umum	-	-	-	-
2) Dana Bagi Hasil	15.621,24	5.460,86	18.265,23	3.652,32
3) Dana Alokasi Khusus	3.148,97	759,97	3.136,63	351,29
b. Dana Insentif Daerah	-	-	-	-
c. Dana Otonomi Khusus	-	-	-	-
d. Dana Keistimewaan Yogyakarta	-	-	-	-
2. Dana Desa	-	-	-	-
C. SURPLUS DEFISIT	(667.038,49)	79.474,74	(642.242,04)	87.067,03

Sumber: GFS Triwulan I 2018, OM SPAN, Simtrada (data diolah).

Dari tabel 2.1, dapat diketahui bahwa realisasi penerimaan sampai dengan triwulan I tahun 2018 meningkat dibandingkan penerimaan triwulan I tahun 2017 sebesar 15,11%. Adapun realisasi belanja Pemerintah Pusat pada triwulan I tahun 2018 sebesar 15,20% dari pagu, dan lebih tinggi dibanding realisasi belanja pada triwulan I tahun 2017 sebesar

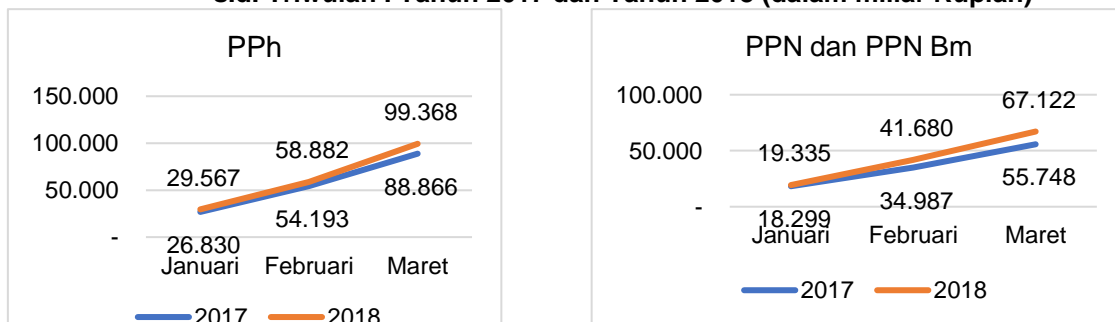
19,60%. Sedangkan realisasi transfer ke daerah dan dana desa pada triwulan I tahun 2018 mencapai 18,71% dari pagu transfer ke daerah dan dana desa tahun 2018. Realisasi tersebut lebih rendah sebesar 35,64% dibandingkan realisasi transfer ke daerah pada triwulan I tahun 2017. Sebagaimana pada tahun 2017, pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya menerima alokasi transfer ke daerah dalam bentuk Dana Bagi Hasil dan DAK Non Fisik.

A. Pendapatan Negara

1. Penerimaan Perpajakan

- a) Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPN Bm)

Grafik 2.1
Realisasi Penerimaan Perpajakan Lingkup Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam miliar Rupiah)



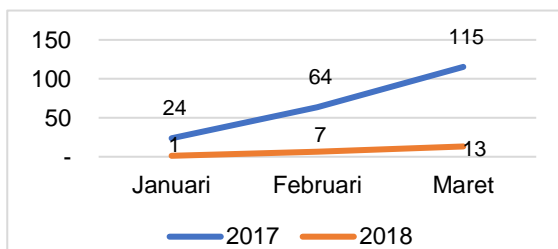
Sumber: GFS Triwulan I 2018, OM SPAN (data diolah),

Secara umum, realisasi penerimaan pajak pada triwulan I tahun 2018 mengalami peningkatan yang signifikan dibandingkan realisasi penerimaan pajak pada triwulan I tahun 2017. Dari grafik 2.1, diketahui realisasi penerimaan Pajak Penghasilan pada triwulan I Tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp10.501,87 milyar atau 11,82% dibandingkan penerimaan pada triwulan I Tahun 2017. Kenaikan tersebut merupakan dampak positif kelanjutan program amnesti pajak dimana semakin banyak wajib pajak yang melaporkan penghasilannya dalam SPT Tahunan. Kenaikan tersebut cukup signifikan dibandingkan dengan sebelum dilakukannya program amnesti pajak.

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah (PPN Bm) pada triwulan I Tahun 2018 juga mengalami kenaikan sebesar Rp11.374,44 milyar atau 20,40% dibandingkan dengan realisasi penerimaan PPN dan PPN Bm pada triwulan I Tahun 2017. Kenaikan tersebut juga dipengaruhi oleh program amnesti pajak dimana wajib pajak melakukan pelunasan pajak yang menjadi tanggungannya.

b) Penerimaan Cukai

Grafik 2.2 Penerimaan Cukai



Sumber: OMSPAN, 2018 (data diolah)

Dari grafik 2.2, dapat diketahui bahwa selama triwulan I tahun 2018, penerimaan cukai lebih rendah daripada penerimaan cukai selama triwulan I Tahun 2017 yaitu sebesar Rp102,14 miliar atau 88,55%.

Penurunan ini terutama disebabkan menurunnya produksi rokok sebagai sumber utama penerimaan cukai. Adapun realisasi penerimaan cukai sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar Rp13,21 miliar atau 0,17% dari realisasi penerimaan secara nasional yang sebesar Rp 8 triliun.

2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Sebagaimana grafik 2.3, penerimaan sumber daya alam pada triwulan I tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan penerimaan sumber daya alam pada triwulan I tahun 2017 sebesar Rp1.181,97 miliar atau 17,54%. Peningkatan penerimaan sumber daya alam khususnya disebabkan membaiknya harga komoditas khususnya minyak bumi dan batu bara sepanjang awal tahun 2018.

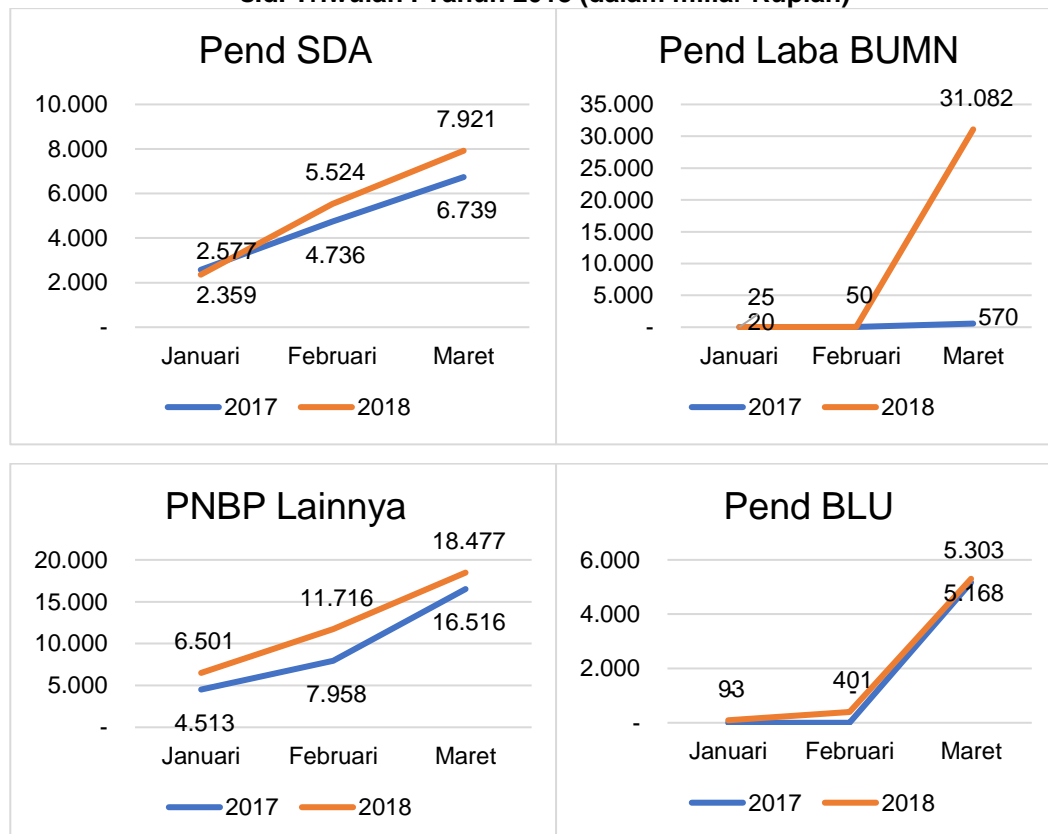
Sebagaimana grafik 2.3, penerimaan sumber daya alam pada triwulan I tahun 2018 lebih tinggi dibandingkan penerimaan sumber daya alam pada triwulan I tahun 2017 sebesar Rp1.181,97 miliar atau 17,54%. Peningkatan penerimaan sumber daya alam khususnya disebabkan membaiknya harga komoditas khususnya minyak bumi dan batu bara sepanjang awal tahun 2018. Realisasi penerimaan sumber daya alam sampai triwulan I tahun 2018 mencapai Rp7,92 triliun atau sebesar 22% dari penerimaan sumber daya alam secara nasional sebesar Rp36 triliun.

Penerimaan Bagian Laba BUMN mengalami peningkatan signifikan sebesar Rp30,51 miliar atau 5353,02 % dibandingkan dengan penerimaan pada triwulan I tahun 2017. Peningkatan tersebut disebabkan adanya BUMN yang telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham dan menyetorkan deviden tahun 2017 Bagian Pemerintah pada bulan Maret 2018. Kenaikan juga disebabkan pembayaran piutang deviden beberapa BUMN sebelum tahun 2017. Total realisasi penerimaan laba BUMN sampai dengan triwulan I tahun 2018 sebesar Rp31,08 miliar atau 100% dari penerimaan nasional.

Sedangkan pendapatan BLU mengalami peningkatan sebesar Rp.135,6 milyar atau 2,62% dibanding realisasi pendapatan BLU pada triwulan I tahun 2017. Total realisasi

penerimaan BLU memberikan kontribusi sebesar 52,50% dari penerimaan BLU secara nasional sebesar Rp.10,1 triliun.

Grafik 2.3
Realisasi PNPB Lingkup Provinsi DKI Jakarta
s.d. Triwulan I Tahun 2018 (dalam miliar Rupiah)



Sumber: OMSPAN, 2018 (data diolah)

Adapun realisasi penerimaan PNPB Lainnya pada triwulan I tahun 2018 mengalami kenaikan sebesar Rp.13.310,00 milyar atau tumbuh 257,55% dibanding realisasi triwulan I tahun 2017. Penerimaan tersebut terutama berasal dari penjualan cadangan beras Pemerintah dalam rangka operasi pasar dan penjualan obligasi negara. Realisasi penerimaan PNPB Lainnya pada triwulan I tahun 2018 setara dengan 24,22% dari penerimaan PNPB Lainnya secara nasional sebesar Rp.24,9 triliun.

3. Pendapatan Hibah

Tabel 2.2
Realisasi Pendapatan Hibah Lingkup Provinsi DKI Jakarta
s.d. Triwulan I Tahun 2018 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Trw I (Rp)	(%) Realisasi atas Pagu
Hibah	-	-	-
Total Hibah	-	-	-

Sumber: GFS Triwulan I Tahun 2018, OMSPAN

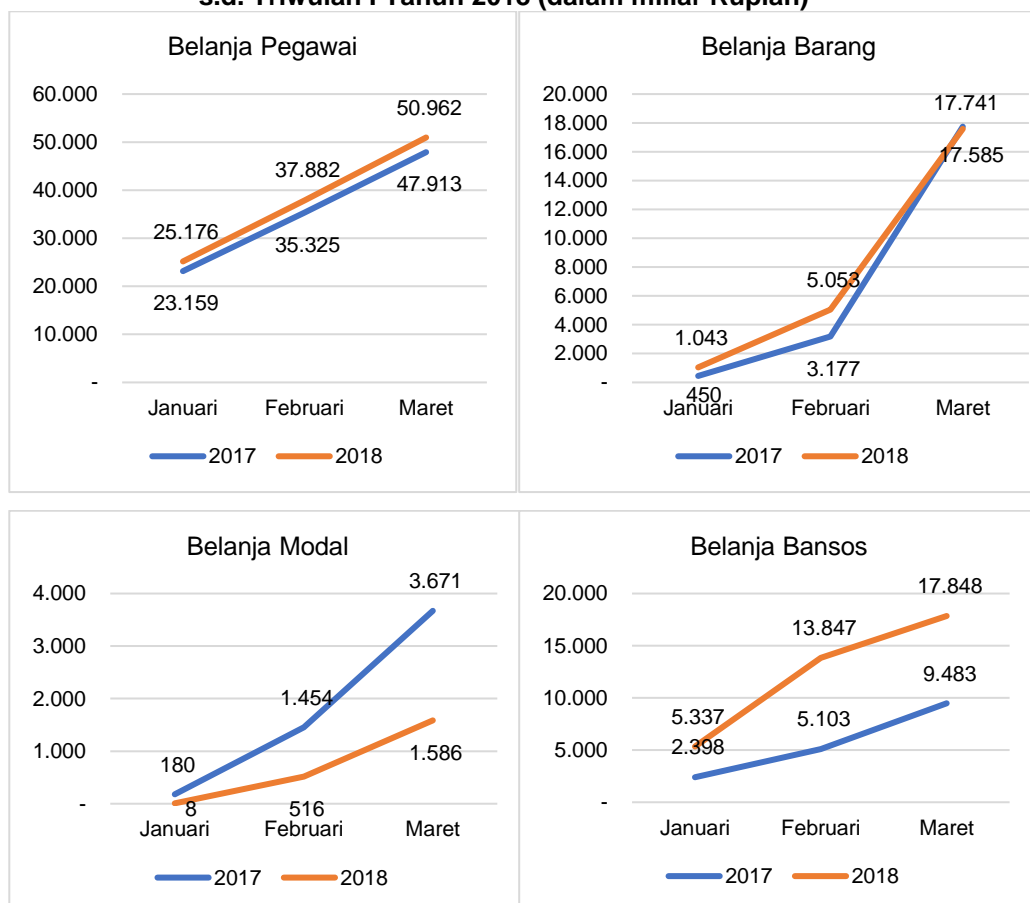
Dari tabel 2.2, dapat dijelaskan bahwa pada triwulan I tahun 2018, tidak terdapat penerimaan hibah pada lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta.

B. Belanja Negara

1. Belanja Pemerintah Pusat

Dari grafik 2.4, total realisasi belanja Pemerintah Pusat pada triwulan I tahun 2018 sebesar Rp113.550,90 miliar, atau mencapai angka 15,20% dari pagu belanja Pemerintah Pusat tahun 2018. Jumlah tersebut lebih tinggi apabila dibandingkan dengan realisasi belanja Pemerintah Pusat pada triwulan I tahun 2017 yang hanya sebesar 12,18% dari pagu.

Grafik 2.4
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Lingkup Provinsi DKI Jakarta
s.d. Triwulan I Tahun 2018 (dalam miliar Rupiah)



Sumber: GFS Triwulan I Tahun 2018, OMSPAN

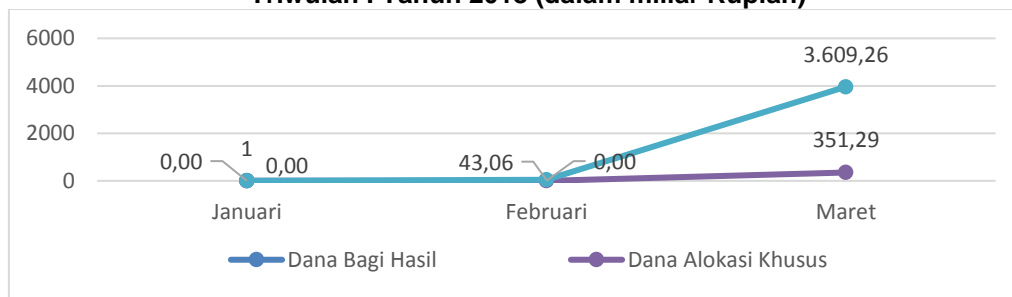
Kenaikan jumlah belanja tersebut terutama disebabkan oleh tingginya realisasi belanja barang dan belanja bantuan sosial pada triwulan ini. Kenaikan belanja barang dipicu oleh meningkatnya kegiatan operasional Pemerintahan, sedangkan kenaikan realisasi belanja bantuan social dipicu terutama oleh

program bantuan dan perlindungan social seperti program penyaluran PKH untuk keluarga. Total realisasi belanja Pemerintah Pusat pada Provinsi DKI Jakarta pada triwulan I tahun 2018 setara dengan 68,61% dari total realisasi belanja secara nasional sebesar Rp.165,5 triliun.

2. Transfer ke Daerah dan Dana Desa

Pada tahun 2018, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menerima alokasi Transfer ke Daerah berupa Dana Bagi Hasil dan Dana Alokasi Khusus Non Fisik. Sampai dengan akhir triwulan I tahun 2018, realisasi dana transfer ke daerah mencapai Rp.4.003,61 milyar atau 21,92% dari alokasi pagu transfer ke daerah sebesar Rp.18.265,23. Apabila dibandingkan dengan alokasi pagu transfer ke daerah dan dana desa dalam APBN 2018 sebesar Rp.766,2 trilyun, alokasi transfer ke daerah yang diterima oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta relatif kecil, yaitu hanya sebesar 2,38%. Hal ini mengingat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta telah memiliki kemandirian keuangan yang cukup tinggi sehingga dapat mengandalkan Penerimaan Asli Daerah sebagai sumber pembiayaan Pemerintah Daerah.

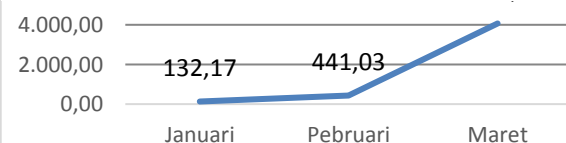
Grafik 2.5
Realisasi Dana Transfer dan Dana Desa Lingkup Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan I Tahun 2018 (dalam miliar Rupiah)



Sumber: GFS Triwulan I Tahun 2018, OMSPAN

3. Pengelolaan BLU

Grafik 2.6 Realisasi Belanja Satuan Kerja Pengguna BLU DKI Jakarta



Sumber: GFS Triwulan I Tahun 2018. OMSPAN. Simtrada

Dari grafik 2.6, realisasi belanja BLU pada triwulan I tahun 2018 sebesar Rp4.646,55 miliar, atau 19,44% dari pagu sebesar Rp.23.897,98 milyar. Realisasi

terbesar terjadi pada bulan Maret 2018 mengingat pada bulan tersebut, telah banyak kegiatan pada satuan kerja pengelola BLU. Pada lingkup Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta, terdapat 39 BLU dengan total pagu sebesar Rp.23.897,98 milyar. oleh satuan kerja dimaksud.

4. Manajemen Investasi Pusat

Sampai dengan triwulan I Tahun 2018, investasi pemerintah Pusat yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebanyak 4 pinjaman terdiri dari 3 pinjaman untuk Pemprov DKI Jakarta dan 1 pinjaman untuk PDAM DKI Jakarta. Posisi pinjaman dimaksud dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel 2.3
Outstanding Pinjaman Lingkup Provinsi DKI Jakarta
s.d. Triwulan I Tahun 2018

No.	Nomor Pinjaman	Tanggal Pinjaman	Loan Id	Jumlah Hak Tagih (miliar)	Debitur	Status
1.	SLA-876/DP3/1996	14-02-1996	2117201		Pemprov DKI	Sudah Lunas
2.	AMA-363/SLA-607/DSMI	19-02-2010	2077401		PDAM DKI	Sudah Lunas
3.	SLA-1247/DSMI/2012	16-05-2012	2219001	504,9	Pemprov DKI	Belum jatuh tempo
4.	SLA-1263/DSMI/2016	04-02-2016	2241001		Pemprov DKI	Belum ada penarikan
Jumlah Hak Tagih				504,9		

Sumber : BAR Outstanding Pinjaman Semester II 2017

C. Prognosis Realisasi APBN

Dalam triwulan I tahun 2018, perekonomian Provinsi DKI Jakarta tumbuh 6,02%, lebih tinggi dari angka pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,01%. Angka tersebut diperkirakan akan mengalami kenaikan mengingat pada triwulan II tahun 2018 terdapat momen lebaran dan pembayaran tunjangan hari raya bagi para pegawai negeri sipil yang akan menyebabkan konsumsi masyarakat bertambah. Demikian pula dengan realisasi pendapatan dan belanja Pemerintah diperkirakan akan mengalami kenaikan mengingat proses pengadaan untuk kebutuhan operasional kantor semakin tinggi. Dengan memperhatikan tingkat pertumbuhan ekonomi serta realisasi pendapatan dan belanja pada triwulan II tahun 2017, diperoleh angka prognosis untuk triwulan II tahun 2018 sebagai berikut :

Tabel 2.4
Prognosis Realisasi APBN Lingkup Provinsi DKI JAKARTA s.d. Triwulan II
Tahun 2018 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Triwulan I Tahun 2018		Perkiraan Realisasi s.d. Triwulan II	
		Rp	% Realisasi thd Pagu	Rp	% Perkiraan Realisasi thd Pagu
Pendapatan Negara		204.621,54		537.625,83	
Belanja Negara	773.636,94	117.554,51	15,20%	343.030,62	44,34%
Surplus/Defisit		87.067,03		194.595,21	

Sumber : OMSPAN, <http://e-rekon-lk.djpbk.kemenkeu.go.id/>, www.bi.go.id

BAB III

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN APBD

Pagu Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk tahun 2018 sebesar Rp66,03 triliun. APBD Pemprov DKI Jakarta mengalami kenaikan sebesar Rp3,51 triliun atau sebesar 5,61% bila dibandingkan pagu anggaran 2017 yang mencapai sebesar Rp62,52 triliun.

Tabel 3.1
Realisasi APBD Provinsi DKI Jakarta
s.d. Triwulan I Tahun 2017 dan Tahun 2018 (dalam miliar Rupiah)

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
PENDAPATAN	62.517,74	13.276,10	66.029,98	11.171,05
PAD	41.687,39	7.067,91	44.570,51	7.167,57
Pajak Daerah	35.359,50	6.230,05	38.125,00	6.413,82
Retribusi Daerah	680,15	130,95	689,90	109,49
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	465,89	22,89	539,93	0,22
Lain-Lain PAD yang Sah	5.181,84	684,02	5.215,68	644,04
Pendapatan Transfer		6.208,18	21.401,86	4.003,47
Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	18.696,34	5.464,79	21.401,86	4.003,47
Dana Bagi Hasil Pajak	15.537,05	5.408,49	18.105,34	3.620,38
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (SDA)	0	39,72	159,89	31,79
Dana Alokasi Umum	0	0	0	0
Dana Alokasi Khusus	3.159,28	16,58	3.136,63	351,29
Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya		743,39		0
Dana Otonomi Khusus		0		0
Dana Penyesuaian		743,39		0
Transfer Pemerintah Provinsi		0		0
Pendapatan Bagi Hasil Pajak		0		0
Pendapatan Bagi Hasil Lainnya		0		0
Transfer Bantuan Keuangan		0		0
Bantuan Keuangan dari Pemerintah Prov./Kabupaten/Kota Lainnya		0		0
Lain-lain pendapatan daerah yang sah	2.134,01	0	57,61	0,01
Pendapatan Hibah	2.134,01	0	57,61	0,01
Pendapatan Dana Darurat		0		0
Pendapatan Lainnya		0		0
JUMLAH PENDAPATAN	62.517,74	13.276,10	66.029,98	11.171,05
BELANJA	61.821,92	4.914,60	71.169,64	6.118,96
Belanja Pegawai	22.606,12	3.073,39	23.272,19	4.040,86
Belanja Barang	16.737,24	1.492,96	20.035,71	1.864,71
Belanja Bunga	35,55	13,78	50,52	17,47
Belanja Subsidi	1.921,32	19,00	4.210,50	71,97
Belanja Hibah	1.472,76	111,88	1.802,08	0
Belanja Bantuan Sosial	3.233,84	0	4.183,31	0
Belanja Bantuan Keuangan	364,72	0		0
Belanja Modal	15.410,23	203,60	16.995,20	123,80
Belanja Tidak Terduga	40,11	0	348,36	0,14
PEMBIAYAAN DAERAH	-695,82	7.706,28	5.139,66	12.481,82
PENERIMAAN PEMBIAYAAN DAERAH	9.305,83	7.706,28	11.087,38	12.498,63
Saldo Kas Tahun lalu	7.706,28	7.706,28	6.801,25	12.498,63
Penerimaan Pinjaman Daerah	1.599,54	0	3.636,12	0
Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	0	0	650,00	0
PENGELUARAN PEMBIAYAAN DAERAH	10.001,65	0	5.947,72	16,81
Pembentukan dana Cadangan	0	0	0	0
Penyertaan Modal Investasi	9.984,45	0	5.914,09	0
Pembayaran Pokok Utang	17,19	0	33,63	16,81
Pemberian Pinjaman Daerah	0	0	0	0

Uraian	Tahun 2017		Tahun 2018	
	Pagu	Realisasi	Pagu	Realisasi
TRANSFER PEMERINTAH DAERAH	0	0	271,78	0
Transfer/Bagi Hasil ke Desa	0	0	0	0
Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0	0	0	0
Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0	0	0	0
Transfer Bantuan Keuangan	0	0	0	0
Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0	0	269,97	0
Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0	0	0	0
Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0	0	1,81	0
JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER	61.821,92	4.914,60	71.169,64	6.118,96
SURPLUS/DEFISIT	695,82	8.361,49	(5.139,66)	5.052,09

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta dan Laporan GFS Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta (data diolah)

Tabel 3.1 menjelaskan bahwa hingga akhir triwulan I 2018 realisasi pendapatan APBD DKI Jakarta mencapai Rp11.171,05 miliar atau 16,29% dari pagu yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp 66.029,98 miliar. Penerimaan pada triwulan I 2018 lebih tinggi dari penerimaan triwulan I 2017, yaitu sebesar Rp 2.105,05 miliar. Penerimaan APBD Provinsi DKI Jakarta sebagian besar ditopang dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah yang mencapai Rp7.167,57 miliar atau 16,08% dari pagu yang dianggarkan.

Sampai dengan triwulan I 2018 realisasi pendapatan dari dana transfer sebesar Rp4.003,47 miliar atau 18,71% dari pagu anggaran sebesar Rp 21.401,86 miliar. Sedangkan pendapatan yang berasal dari lain-lain pendapatan yang sah mencapai sebesar Rp 0,01 miliar atau 0,02% dari pagu anggaran.

Hingga akhir Triwulan I tahun 2018 realisasi belanja APBD Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta mencapai Rp 6.118,96 miliar atau mencapai 8,60% dari pagu anggaran belanja. Dari realisasi belanja triwulan I tahun 2018 APBD Pemda Provinsi DKI, realisasi belanja terbesar adalah Belanja Pegawai yang mencapai realisasi sebesar Rp 4.040,86 miliar, kemudian disusul Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp 1.864,71 miliar dan Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp 0 miliar. Tingginya realisasi Belanja Pegawai disebabkan Pemerintah DKI Jakarta memberikan Tunjangan Kinerja Daerah yang cukup tinggi kepada para pegawainya, dengan harapan tercipta semangat kerja dan integritas yang tinggi dari para pegawai DKI Jakarta.

A. Pendapatan Daerah

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

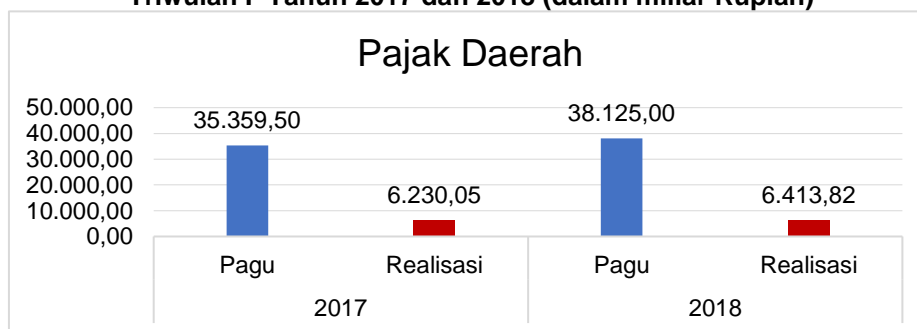
Penerimaan PAD sampai dengan triwulan I 2018 adalah sebesar Rp 7.167,57 miliar atau sebesar 16,08% dari target Penerimaan dalam APBD Provinsi DKI Jakarta sebesar Rp 44.570,51 miliar. Porsi terbesar PAD masih diperoleh dari pajak daerah yang mencapai Rp 6.413,82 miliar atau 16,82% dari pagu. Hal ini sesuai dengan Jakarta sebagai kota jasa dan perdagangan, yang memperoleh penerimaan pajak

daerah terutama dari pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan PBB. Sedangkan penerimaan retribusi sampai dengan triwulan I 2018 baru mencapai Rp 109,49 miliar atau 15,87% dari pagu sebesar Rp 689,90 miliar.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mencapai Rp 0,22 miliar atau mencapai 0,04% dari pagu. Sedangkan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah mencapai sebesar Rp 644,04 miliar atau sebesar 12,35% dari pagu.

a) Penerimaan Pajak Daerah

Grafik 3.1
Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Pemda Provinsi DKI Jakarta
Triwulan I Tahun 2017 dan 2018 (dalam miliar Rupiah)



Sumber: DPKD Provinsi DKI Jakarta dan Laporan GFS Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta (data diolah)

Grafik 3.1 menjelaskan bahwa pada APBD tahun 2018, sebesar 85,54% atau sebesar Rp 38.125 miliar dari pendapatan daerah direncanakan akan diperoleh dari pajak daerah. Adapun realisasi pajak daerah sampai akhir triwulan I 2018 sebesar Rp 6.413,82 miliar atau sebesar 16,82% dari pagu yang dianggarkan. Dari sisi pagu yang dianggarkan mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan APBD 2017 yaitu sebesar Rp 2.765,5 miliar. Apabila dibandingkan dengan triwulan yang sama realisasi pendapatan pajak naik yaitu sebesar Rp 183,82 miliar. Salah satu penyebab kenaikan adalah dihapusnya denda pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama, membuat wajib pajak membayar pajak kendaraan mereka yang tertunggak.

b) Penerimaan Retribusi Daerah

Grafik 3.2
Realisasi Penerimaan Retribusi Daerah
Lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta Triwulan I Tahun 2017 dan 2018
(dalam Miliar Rupiah)

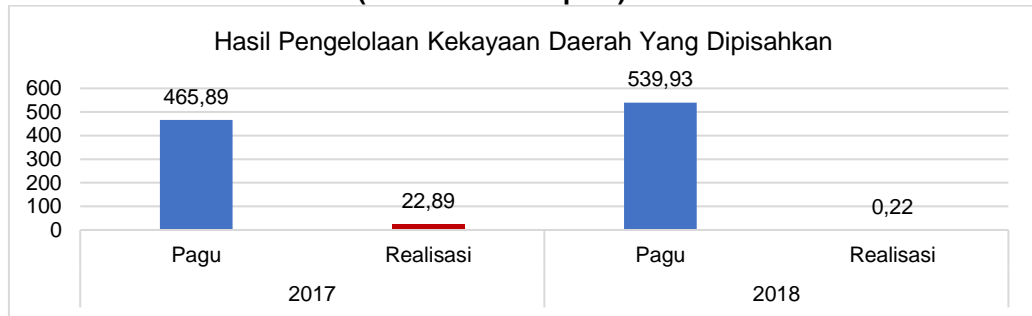


Sumber: DPKD Provinsi DKI Jakarta dan Laporan GFS Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta (data diolah)

Grafik 3.2 menjelaskan bahwa pada APBD tahun 2018, retribusi daerah direncanakan sebesar Rp 689,90 miliar dan hingga akhir triwulan I 2018 terealisasi sebesar 15,87 % atau mencapai sebesar Rp 109,49 miliar.

c) Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Grafik 3.3
Realisasi Penerimaan Hasil Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
Lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta Triwulan I Tahun 2017 dan 2018
(dalam Miliar Rupiah)

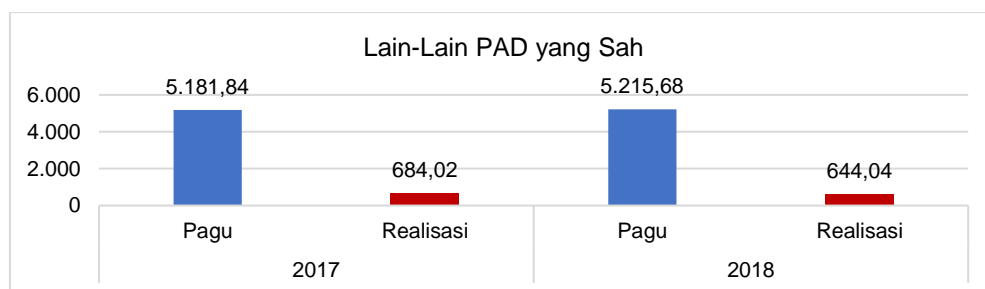


Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta dan Laporan GFS Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta (data diolah)

Grafik 3.3 menjelaskan bahwa pada APBD tahun 2018, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan direncanakan sebesar Rp 539,93 miliar dan hingga akhir triwulan I 2018 terealisasi sebesar 0,003 % atau mencapai sebesar Rp 0,002 miliar. Jumlah pagu anggaran bila dibandingkan pada periode yang sama ditahun 2017 ada peningkatan yang cukup signifikan yaitu sebesar Rp 74,04 miliar. Sementara realisasi penerimaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan pada periode yang sama, tahun 2018 mengalami penurunan yang signifikan sebesar Rp 22,67 miliar

d) Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah

Grafik 3.4
Realisasi Penerimaan Lain – lain Pendapatan Asli Daerah
Lingkup Pemda Provinsi DKI Jakarta Triwulan I Tahun 2017 dan 2018
(dalam Miliar Rupiah)

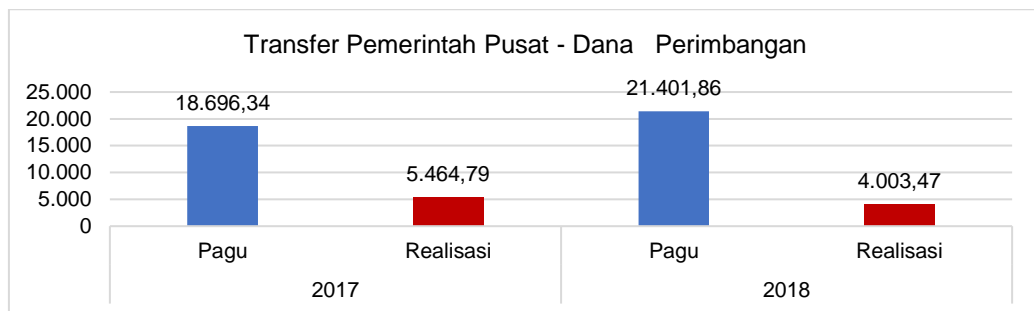


Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta dan Laporan GFS Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta (data diolah)

Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Pada APBN tahun 2018, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah direncanakan sebesar Rp5.125,68 miliar dan hingga akhir triwulan I 2018 realisasi mencapai sebesar Rp 644,04 atau mencapai 12,56%.

2. Pendapatan Transfer / Dana Perimbangan

Grafik 3.5
Realisasi Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan
Pemda Provinsi DKI Jakarta Triwulan I Tahun 2017 dan 2018
(dalam Miliar Rupiah)

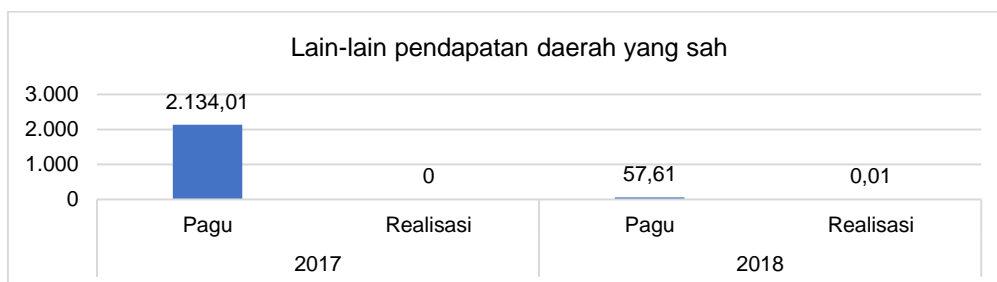


Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta dan Laporan GFS Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta (data diolah)

Grafik 3.5 menjelaskan bahwa pada APBD tahun 2018, dana transfer direncanakan sebesar Rp 21.401,86 miliar dan hingga akhir triwulan I terealisasi sebesar 18,70% atau sebesar Rp 4.003,47.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Grafik 3.6
Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pemda Provinsi DKI Jakarta Triwulan I Tahun 2017 dan 2018
(dalam Miliar Rupiah)



(sumber: Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD Tahun Anggaran 2018)

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp 57,61 miliar dan hingga akhir triwulan I 2018 realisasi mencapai sebesar Rp 0,01 miliar atau sebesar 0,017%. Dalam hal ini Pemerintah DKI Jakarta memperoleh Hibah dari pemerintah pusat atas proyek MRT sesuai dengan perjanjian hibah daerah beserta amandemen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI

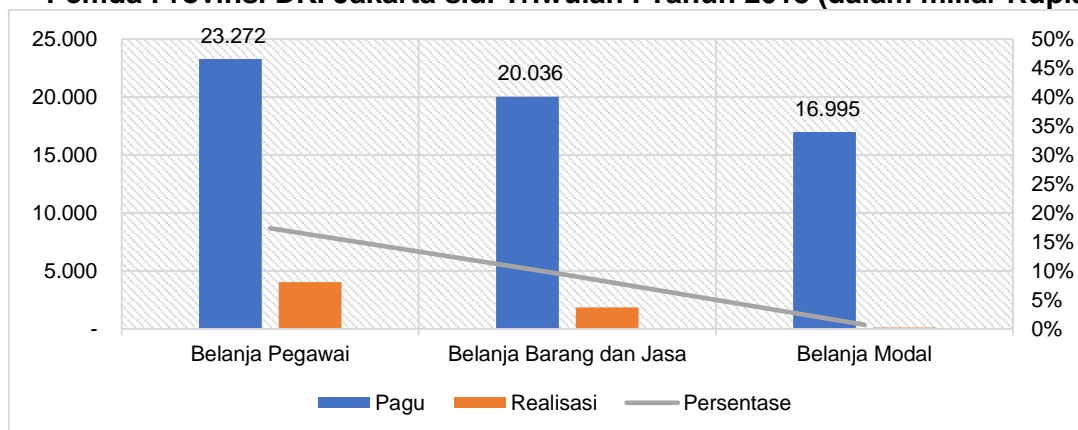
Jakarta yang didalam penarikan hibah tersebut pencairannya sesuai dengan persentase pekerjaan proyek MRT Jakarta dan Hibah PT. Jasa Raharja (Persero).

B. Belanja Daerah

1. Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal

Belanja pegawai hingga akhir triwulan I 2018 terealisasi mencapai sebesar Rp 4.040,86 miliar atau sebesar 17,36% dari total rencana pada APBD 2018 yang dianggarkan sebesar Rp23.272,19 miliar. Sedangkan belanja barang dan jasa hingga akhir triwulan I 2018 terealisasi sebesar Rp 1.864,71 miliar atau sebesar 9,3% dari total rencana APBD tahun 2018 yang mencapai sebesar Rp 20.035,71 miliar. Sementara itu belanja modal hingga akhir triwulan I 2018 terealisasi sebesar Rp 123,80 miliar atau sebesar 0,73% dari total rencana pada APBD tahun 2018 yang dianggarkan sebesar Rp16.995,20 miliar sebagaimana tergambar pada grafik 3.7.

Grafik 3.7
Pagu dan Realisasi Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal Pemda Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan I Tahun 2018 (dalam miliar Rupiah)

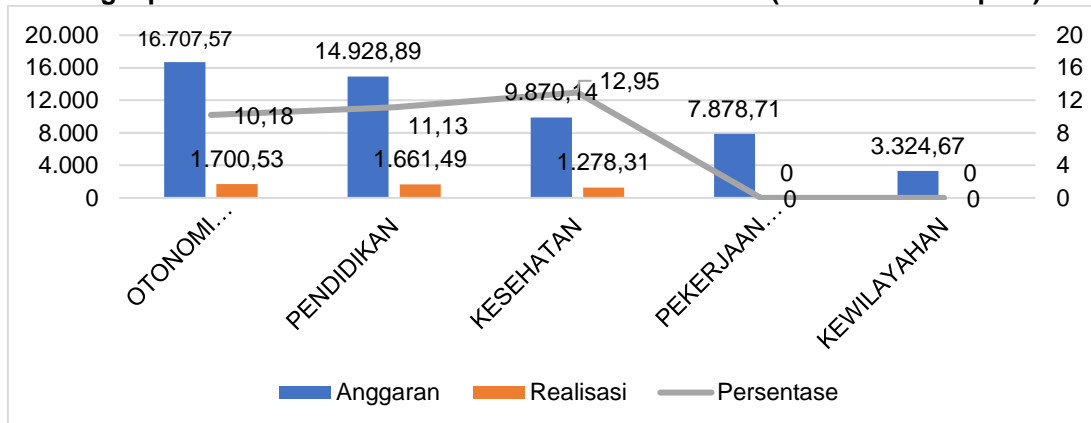


Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta dan Laporan GFS Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta (data diolah)

2. Belanja Daerah Berdasarkan Klasifikasi Urusan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menjalankan urusan yang dituangkan dalam APBD sebanyak 26 urusan wajib dan 7 urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi prioritas di Provinsi DKI Jakarta, terlihat dari porsi alokasi anggarannya yang besar, adalah urusan Pelayanan Pemerintahan (Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian), Pendidikan, Pekerjaan Umum, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup.

Grafik 3.8
Pagu dan Realisasi Belanja Berdasarkan Urusan (Lima Urusan Tertinggi)
Lingkup Provinsi DKI Jakarta s.d. triwulan I Tahun 2018 (dalam miliar Rupiah)



Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta dan Laporan GFS Kanwil DJPb Provinsi DKI Jakarta (data diolah)

Grafik 3.8 menjelaskan bahwa pada tahun 2018 DKI Jakarta mengalokasikan dana sebesar Rp42,34 triliun yang terdiri dari urusan pendidikan sebesar Rp14,93 triliun, kesehatan Rp 9,87 triliun, pekerjaan umum Rp 0,30 triliun, lingkungan hidup Rp 0,53 triliun dan otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian sebesar Rp16,71 triliun.

C. Prognosis Realisasi APBD Sampai Dengan Akhir Tahun 2018

Tabel 3.2
Perkiraan Realisasi APBD Lingkup Provinsi DKI Jakarta
s.d. Triwulan I tahun 2018 (dalam miliar rupiah)

Uraian	Pagu	Realisasi s.d. Tw I		Perkiraan s.d TW IV	
		Rp	%	Rp	%
Pendapatan Daerah	62.466,13	46.483,99	74,41	63.715,45	102
Belanja Daerah	70.191,95	34.626,20	44,10	63.317,27	90
Surplus/Defisit		17.871,03		398,18	

Sumber : BPKD Pemprov DKI Jakarta dan Laporan GFS Kanwil DJPb Prov DKI Jakarta (data diolah)

Berdasarkan tabel 3.2 dijelaskan bahwa hasil evaluasi terhadap realisasi pelaksanaan kegiatan dalam APBD tahun 2018, dapat diproyeksikan besaran pendapatan daerah mencapai 102 persen, sementara besaran belanja mencapai 90 persen.

BAB IV

PERKEMBANGAN DAN ANALISIS PELAKSANAAN ANGGARAN KONSOLIDASIAN (APBN DAN APBD)

A. Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian

Pada Triwulan I tahun 2018 Kantor Wilayah Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian dengan realisasi anggaran sebagaimana tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Laporan Realisasi Anggaran Konsolidasian Tingkat Wilayah Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan I tahun 2018 (dalam Triliun Rupiah)

Uraian	Triwulan I tahun 2018				Triwulan I tahun 2017
	Pusat	Daerah	Konsolidasi	Kenaikan/ Penurunan	Konsolidasi
Pendapatan Negara	204,621	11,171	211,788	13.71 %	186,240
Pendapatan Perpajakan	171,262	6,413	177,676	25,15 %	141,970
Pendapatan Bukan Pajak	33,358	753	34,112	-22.91 %	44,260
Hibah	0	0.11	0.11	-21,42 %	0,140
Transfer	0	4,003*	0	-	0
Belanja Negara	117,553	6,118	119,669	23,55 %	96,860
Belanja Pemerintah	113,550	6,118	119,669	23,55 %	96,860
Transfer	4,003	0	0	-	0
Surplus/(Defisit)	87,067	5,052	92,119	3,06 %	89,380
Pembiayaan	0	12,481	12,481	61,88 %	7,710
Penerimaan Pembiayaan Daerah	0	12,498	12,498	61,88 %	7,710
Pengeluaran Pembiayaan Daerah	0	16	16	-	0
Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran	87,067	17,533	104,600	28,07 %	81,670

Sumber : LKPK Provinsi DKI Jakarta Triwulan I 2018 dan Triwulan I 2017

*Seluruh pengeluaran Dana Transfer ke Daerah untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dari pemerintah pusat yang dieliminasi dengan penerimaan transfer pemerintah daerah.

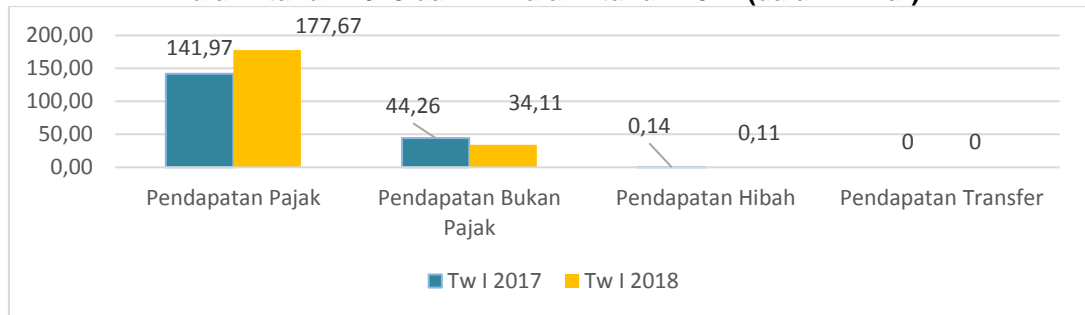
B. Pendapatan Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Pada Triwulan I tahun 2018 Terdapat kenaikan jumlah pendapatan pajak konsolidasian antara Triwulan I tahun 2017 ke Triwulan I tahun 2018 sebesar

25,15%. Kenaikan ini ditopang jenis penerimaan pajak yang berasal dari aktivitas kegiatan impor dan produksi. Kinerja positif beberapa jenis pajak utama, seperti PPh Pasal 21, PPh Badan, dan PPN dalam negeri, menyumbang sinyal positif adanya peningkatan aktivitas ekonomi dari perspektif penerimaan pajak. (<https://bisnis.tempo.co/read/1080137/sri-mulyani-penerimaan-pajak-triwulan-i-2018-tumbuh-994-persen>)

Grafik 4.1
Perbandingan Komposisi Pendapatan Konsolidasian di Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan I tahun 2018 dan Triwulan I tahun 2017 (dalam miliar)

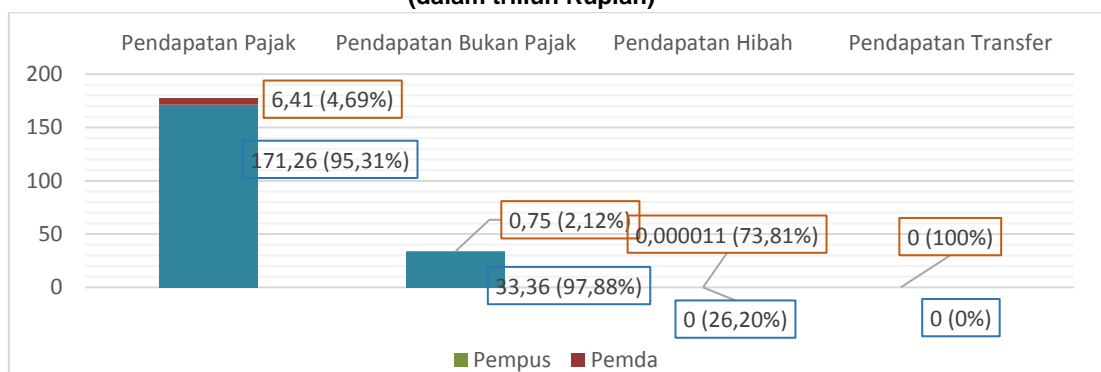


Sumber: LKPK Provinsi DKI Jakarta Triwulan I 2018 dan Triwulan I 2017 (diolah)

Sementara jumlah Pendapatan Bukan Pajak Konsolidasian turun sebesar 22,91%. Penurunan PNBP di DKI Jakarta berasal dari penerimaan sumber daya alam, namun hal ini tidak mempengaruhi peningkatan PNBP nasional sebesar 22,16 persen yang disebabkan oleh meningkatnya harga komoditas global.

Jumlah Pendapatan Hibah Konsolidasian turun sebesar 21,42%. Berasal dari turunnya jumlah hibah untuk Pemerintah Pusat.

Grafik 4.2
Perbandingan Penerimaan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Konsolidasian Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan I tahun 2018 (dalam triliun Rupiah)



Sumber: LKPK Kanwil DJPB untuk Periode yang Berakhir pada 30 Maret 2018 (diolah)

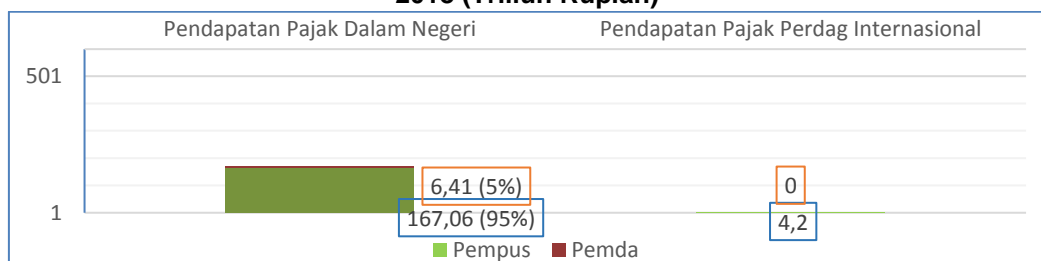
Penerimaan pemerintah pusat jauh lebih besar daripada penerimaan daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, karena penerimaan pemerintah pusat yang

disetor di Provinsi DKI Jakarta merupakan sebagian besar dari penerimaan nasional.

2. Analisis Perubahan

Dibandingkan dengan pendapatan pajak dalam negeri pemerintah pusat yang mencapai 95,31% dari pendapatan pajak konsolidasian, pendapatan pajak dalam negeri Pemerintah Provinsi DKI Jakarta hanya mencapai 4,69% dari pendapatan pajak konsolidasian. Sedangkan untuk pendapatan pajak perdagangan internasional, tidak ada di pendapatan pajak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagaimana Grafik 4.3 di bawah.

Grafik 4.3
Perbandingan Penerimaan Perpajakan Pemerintah Pusat dan Daerah terhadap Penerimaan Perpajakan Konsolidasian Provinsi DKI Jakarta s.d. Triwulan II tahun 2018 (Triliun Rupiah)



Sumber: LKPK Kanwil DJPB untuk Periode yang Berakhir pada 30 Maret 2018 (diolah)

3. Analisis Pertumbuhan Ekonomi terhadap kenaikan realisasi pendapatan konsolidasian

Pada Triwulan I tahun 2018 PDRB Provinsi DKI Jakarta terealisasi sebesar Rp632,61 Triliun dengan pertumbuhan ekonomi sebesar 6,02%.

Tabel 4.2
Realisasi Pendapatan Konsolidasian Pempus dan Pemda di wilayah Provinsi DKI Jakarta Triwulan I tahun 2017 dan 2018 (dalam juta Rupiah)

Uraian	Triwulan I tahun 2017		Triwulan I tahun 2018	
	Realisasi	Kenaikan	Realisasi	Kenaikan
Penerimaan Perpajakan	141,96	(7,97)	177,67	25,15 %
PNBP	44,26	58,35	34,11	-22,91 %
Total	186,22	16,24	211,78	13,72 %
PDRB/Pert. Ekonomi	574,08	10,82	632,61	10,19

Sumber: LKPK Kanwil DJPB untuk Periode yang Berakhir pada 30 Maret 2018 dan 30 Maret 2017 (diolah) dan Berita Resmi Statistik Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 dan 2018 (diolah)

Pada periode yang sama, pendapatan yang diterima pemerintah daerah dan pemerintah pusat terealisasi sebesar Rp211,79 Triliun. Selisih positif angka

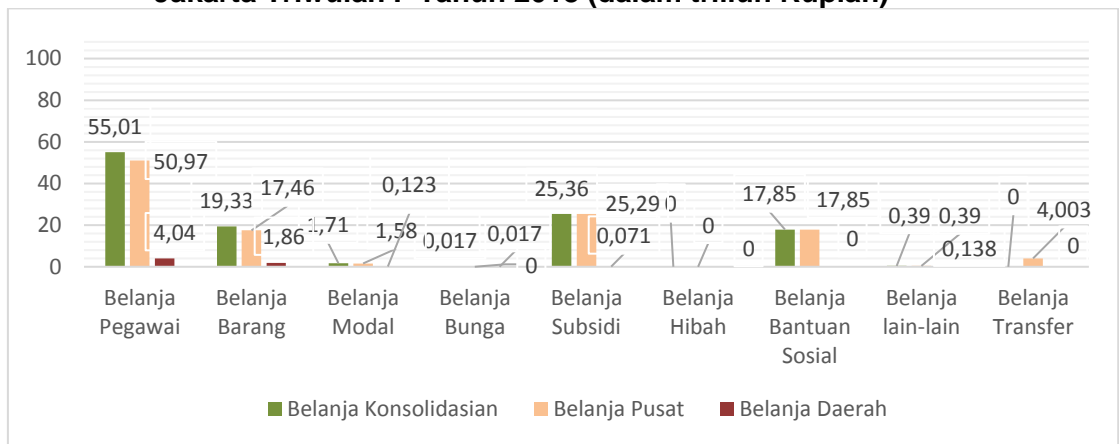
pertumbuhan ekonomi dan kenaikan pendapatan tersebut menunjukkan potensi penerimaan sebagai akibat pertumbuhan ekonomi telah dioptimalkan oleh khususnya pemerintah daerah.

C. Belanja Konsolidasian

1. Analisis Proporsi dan Perbandingan

Seluruh Belanja Konsolidasian didominasi oleh Belanja Pusat karena Provinsi DKI Jakarta sebagai ibu kota dan pusat pemerintahan Negara Republik Indonesia.

Grafik 4.4
Perbandingan Belanja dan Transfer Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Belanja dan Transfer Konsolidasian pada Provinsi DKI Jakarta Triwulan I Tahun 2018 (dalam triliun Rupiah)

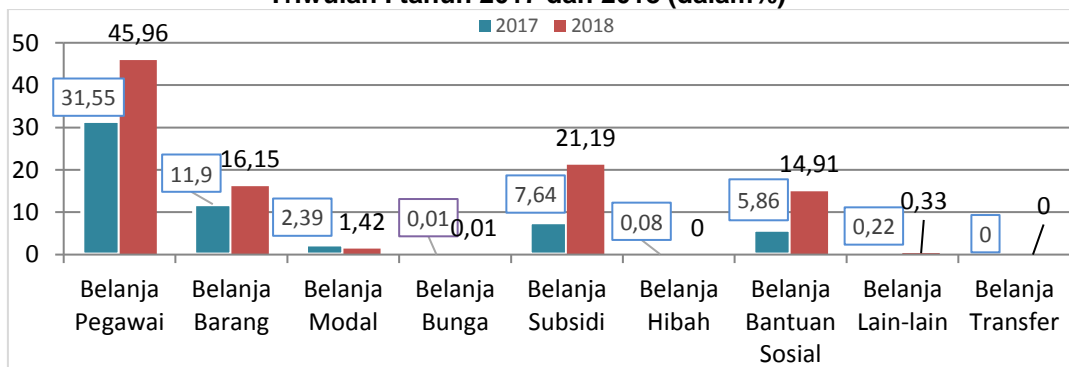


Sumber: LKPK Kanwil DJPB untuk Periode yang Berakhir pada 30 Maret 2018 (diolah)

2. Analisis Perubahan

Perbandingan Komposisi Belanja Konsolidasian Triwulan I tahun 2018 dan 2018 sesuai grafik 4.5.

Grafik 4.5
Tabel Komposisi Belanja Konsolidasian Provinsi DKI Jakarta Triwulan I tahun 2017 dan 2018 (dalam%)



Sumber: LKPK Kanwil DJPB Provinsi DKI Jakarta Triwulan I Tahun 2017 dan 2018 (diolah)

Total Belanja Pemerintah konsolidasian naik sebesar 23,55 persen. Hampir semua komponen Belanja mengalami kenaikan dibandingkan Triwulan I Tahun 2017 kecuali Belanja Modal yang mengalami penurunan sebesar 53 persen disebabkan masih dalam proses lelang.

Yang mengalami kenaikan secara signifikan adalah belanja subsidi konsolidasian yang naik 104,77 persen. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Askolani mengatakan penyerapan tersebut didominasi untuk subsidi bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp15,6 triliun serta subsidi listrik Rp9,6 triliun. Sedangkan belanja bantuan sosial konsolidasian naik sebesar 88,3 persen dipengaruhi adanya pelaksanaan program perlindungan sosial. Menteri Keuangan, Sri Mulyani, saat jumpa pers realisasi APBN triwulan I-2018 di Jakarta, Senin (16/4/2018) menyatakan penyerapan belanja bansos yang dibutuhkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat mencapai 23,2 persen dari target APBN 2018 sebesar Rp77,3 triliun. Anggaran itu untuk penyaluran Program Keluarga Harapan serta pencairan Penerima Bantuan Iuran. Total Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial Konsolidasian di Provinsi DKI Jakarta merupakan pencairan Belanja Subsidi dan Bantuan Sosial secara nasional. Penyerapan belanja bantuan sosial sejak awal tahun ini terutama untuk percepatan penyaluran bagi Program Keluarga Harapan serta pencairan Penerima Bantuan Iuran tiga bulan di muka pada Februari.

Analisis dampak kebijakan fiskal kepada indikator ekonomi regional

Adapun analisis dampak kebijakan fiskal pemerintah kepada indikator ekonomi regional Provinsi DKI Jakarta Triwulan I tahun 2018 dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Realisasi Pertumbuhan Ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada Triwulan I tahun 2018 yang mencapai 6,02 persen (y on y). Sedangkan Pertumbuhan Ekonomi (PDB) Nasional mencapai 5,06 persen. DKI Jakarta berkontribusi 17,57 persen terhadap pertumbuhan ekonomi nasional. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Adrianto menyatakan, tercapainya Pertumbuhan ekonomi nasional berasal dari perbaikan sektor industri pengolahan berada pada fase ekspansi sepanjang triwulan I-2018. Peningkatan kinerja manufaktur pada akhirnya menopang daya beli masyarakat, terutama dari aspek serapan tenaga kerja.
- b. Pertumbuhan ekonomi juga didukung Investasi PMDN dan PMA. Pemerintah melalui Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data realisasi investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) Triwulan I (periode Januari-Maret) Tahun 2018 yang mencapai angka sebesar Rp 185,3 triliun, meningkat 11,8% dari periode yang sama tahun 2017 sebesar Rp

165,8 triliun. Realisasi investasi tersebut secara nasional menyerap 201.239 tenaga kerja Indonesia. Realisasi investasi (PMDN & PMA) berdasarkan lokasi proyek (5 besar) adalah: Jawa Barat (Rp 37,0 triliun, 19,9 %); DKI Jakarta (Rp 28,9 triliun, 15,6%); Jawa Tengah (Rp 16,1 triliun, 8,7%); Banten (Rp 15,5 triliun, 8,4%); dan Riau (Rp 9,1 triliun, 4,9%).

Analisis Kontribusi Pemerintah Dalam Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Laporan Operasional Triwulan I tahun 2018 Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta sebagaimana tabel 4.3 di bawah ini:

Tabel 4.3
Laporan Operasional sebagai salah satu komponen Laporan Statistik Keuangan
Pemerintah Tingkat Wilayah Provinsi DKI JAKARTA Triwulan I tahun 2018
(dalam Rupiah)

Transaksi yang mempengaruhi kekayaan neto	
Pendapatan:	209.268.922.668.020
a. Pajak	171.123.725.998.274
b. Kontribusi sosial	0
c. Hibah	8.006.950.338.138
d. Pendapatan lain	30.138.246.331.608
Beban:	117.837.203.228.291
a. Kompensasi pegawai	51.500.963.787.318
b. Penggunaan barang dan jasa	17.475.840.582.117
c. Konsumsi aset tetap	0
d. Bunga	0
e. Subsidi	25.292.734.159.986
f. Hibah	4.003.610.998.400
g. Manfaat sosial	17.847.652.866.400
h. Beban Lainnya	1.715.400.834.070
Keseimbangan operasi bruto/neto	91.431.719.439.729
Transaksi Aset Non Keuangan Neto	1.705.964.718.563
a. Aset tetap	1.565.584.516.586
b. Persediaan	0
c. Barang berharga	0
d. Aset nonproduksi	140.380.201.977
Net Lending/Borrowing	89.726.754.721.166
Transaksi Aset Keuangan dan Kewajiban	
a. Akuisisi Neto Aset Keuangan	88.098.696.823.023
- Domestik	88.098.696.823.023
- Luar Negeri	0
b. Keterjadian Kewajiban	-16.814.811.715
- Domestik	-16.814.811.715
- Luar Negeri	0

Sumber: Laporan Operasional LSKP- Triwulan I tahun 2018 Provinsi DKI Jakarta

1. Nilai Kontribusi belanja Pemerintah terhadap PDRB

Dihasilkan dengan membandingkan nilai pengeluaran konsumsi pemerintah (kompensasi pegawai+ penggunaan barang dan jasa, konsumsi aset tetap dan pembelian barang/jasa untuk transfer langsung ke rumah tangga (umumnya manfaat

sosial dalam bentuk barang dan jasa) dikurangi penjualan barang dan jasa) terhadap PDRB.

$$\frac{\text{nilai konsumsi pemerintah}}{\text{PDRB}} = \frac{86.824.457.235.835}{632.610.000.000.000} = 0,1372 = 13,72 \%$$

2. Nilai kontribusi investasi pemerintah terhadap PDRB dihitung dari perbandingan nilai PMTB (aset tetap pada Transaksi Aset Non Keuangan Neto) dibagi dengan PDRB = $\frac{1.565.584.516.586}{632.610.000.000.000} = 0,0024 = 0,24 \%$

632.610.000.000.000

Bila dilihat dari nilai di atas, kontribusi investasi pemerintah sangat kecil hanya 0,24 persen. Pada umumnya pemerintah berinvestasi pada Aset Bangunan sedangkan swasta pada aset non bangunan. Untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, diharapkan pemerintah pusat dan pemerintah Provinsi DKI Jakarta dapat meningkatkan investasi serta menggiatkan swasta agar berinvestasi secara aktif, karena investasi dapat menciptakan lapangan kerja dan pada akhirnya dapat mensejahterakan rakyat.

Dalam rangka mempercepat realisasi investasi proyek-proyek PMA/PMDN, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), yang bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha melalui penyederhanaan prosedur perizinan TKA (yang tetap harus memenuhi kualifikasi persyaratan) dan mempercepat layanan izin TKA yang diperbolehkan bekerja di Indonesia, sehingga penyelesaian konstruksi dan operasi produksi proyek investasi dapat segera terwujud. Di samping itu, penyederhanaan perizinan berusaha kebijakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017, diyakini akan dapat mengakselerasi peningkatan realisasi investasi di Indonesia. Daya tarik lainnya dalam upaya peningkatan daya saing iklim investasi Indonesia, Pemerintah juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) melalui PMK Nomor 35/PMK.010/2018 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan atau yang lebih dikenal dengan tax holiday, yang memberikan kemudahan, kepastian dan penyederhanaan pemberian insentif tax holiday

BAB V

BERITA/ISU FISKAL REGIONAL TERPILIH

A. BPRD DKI Usut Mal Tanpa Izin Usaha untuk Dikenai Disinsentif Pajak

Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD) DKI Jakarta sedang mengumpulkan data mal atau pusat perbelanjaan di ibu kota yang beroperasi tanpa izin usaha. Dalam catatan BPRD DKI Jakarta, salah satu mal di ibu kota yang beroperasi tanpa izin usaha adalah Grand Indonesia. BPRD DKI Jakarta memastikan akan mengenakan disinsentif berupa kenaikan nilai Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) bagi para pengusaha pusat perbelanjaan atau mal yang belum memiliki izin usaha di DKI Jakarta.

Diduga ada lebih dari 20 pusat perbelanjaan yang potensial untuk dijadikan tambahan sumber pendapatan daerah dari PBB-P2. Kenaikan ini dilakukan untuk meningkatkan pemasukan pemerintah ibu kota dari PBB-P2 pada 2018 agar dapat mencapai target yang ditetapkan sebesar Rp8,5 triliun.

B. Pemprov DKI Luncurkan OK OCE TECH

Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi meluncurkan One Kecamatan One Center for Entrepreneurship Technology (OK OCE Tech). OK OCE Tech hadir sebagai inisiatif baru yang memiliki semangat untuk membangun dan memajukan ekosistem kewirausahaan berbasis digital dan teknologi di Indonesia. Saat ini OK OCE Tech membuka pendaftaran untuk program *startup accelerator* melalui laman resmi OK OCE Tech. Dan para *entrepreneur* muda dapat mendaftarkan diri melalui laman tersebut.

Program *startup accelerator* ini bersifat terbuka untuk semua kalangan yang berminat mengembangkan usaha berbasis digital atau teknologi. Melalui OK OCE Tech, para peserta akan mendapatkan pelatihan keahlian teknologi dan kerjasama inovasi dengan perusahaan maupun industri.

Situs Resmi OK OCE mencatat bahwa jumlah anggota sampai dengan bulan Maret 2018 adalah 31.727 orang.

Program ini bersinergi untuk menciptakan lapangan kerja dan membangun kehidupan sosial ekonomi yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Cover

<https://sumber.com/jalan-jalan-kuliner/dki-jakarta/budaya-dki-jakarta/sumber/tari-pencak-silat.html>

<http://www.indonesia-tourism.com/jakarta/photo-gallery.html?tari-topeng-betawi-2.jpg>

<http://klikbekasi.co/2014/09/22/wisata-pulau-tidung-dan-mitos-jembatan-cinta/>

Jurnal/Laporan

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, 2018. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2018;

BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018. Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi DKI Jakarta bulan Januari 2018. Berita Resmi Statistik No. 06/02/31/Th.XX, 1 Februari 2018;

BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018. Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi DKI Jakarta bulan Februari 2018. Berita Resmi Statistik No. 11/03/31/Th.XX, 1 Maret 2018;

BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018. Perkembangan Indeks Harga Konsumen Provinsi DKI Jakarta bulan Maret 2018. Berita Resmi Statistik No. 15/04/31/Th.XX, 2 April 2018;

BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018. Tingkat Kemiskinan DKI Jakarta September 2017. Berita Resmi Statistik No.04/01/31/Th.XX 2 Januari 2018;

BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018. Keadaan Ketenagakerjaan Februari 2018 Provinsi DKI Jakarta. Berita Resmi Statistik No.25/05/31/Th.XX 07 Mei 2018;

BPS Provinsi DKI Jakarta, 2018. Informasi Statistik 2017 dan 2018. <https://www.bps.go.id/>;

Online Monitoring SPAN. 2018. Modul Realisasi Penerimaan. <https://spanint.kemenkeu.go.id;>

Online Monitoring SPAN. 2018. Modul Realisasi Belanja. <https://spanint.kemenkeu.go.id;>

Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi DKI Jakarta. 2017 dan 2018. *Government Finance Statistic* Triwulan I 2017; *Government Finance Statistic* Triwulan III 2018;

<http://e-rekon-lk.djpbk.kemenkeu.go.id/>,

www.bi.go.id

www.djpk.go.id

<http://setkab.go.id/>

<http://jakarta.go.id/artikel/konten/2632/pemprov-dki-luncurkan-ok-oc-tech>

<https://tirto.id/bprd-dki-usut-mal-tanpa-izin-usaha-untuk-dikenai-disintensif-pajak-cCPS>